

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang Masalah.

Pada masa Orde Baru pemerintah gencar melaksanakan program transmigrasi dengan tujuan pemerataan penduduk dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Salah satu program pemerintah adalah pengiriman transmigrasi dari Jawa meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur ke Propinsi Sumatera Utara. Di antaranya ke Desa Teluk Panji IV Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan yang berlangsung tahun 1992. Daerah transmigrasi tersebut merupakan daerah yang akan menjadi tempat penelitian penulis. Peneliti akan melakukan penelitian dengan kajian *Strategi Adaptasi Transmigran Jawa dengan Penduduk Lokal di Desa Teluk Panji IV Kecamatan Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan*. Hal-hal yang membuat ketertarikan peneliti terhadap masyarakat transmigran Jawa yang terjadi tahun 1992 di Desa Teluk Panji IV merupakan tempat tinggal peneliti dan keluarga.

Saat itu orang tua kami membeli lahan dari transmigran dari teman bapak yang tinggal di situ sebagai calonya lahan punya transmigran yang tidak betah dan ingin kembali ke kampung halamannya. Namun begitu kami masih bisa merasakan awal-awal kehidupan di daerah transmigran, dan karena tidak mudah dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang selalu kami rasakan sebagai masa transisi kehidupan. Pada tahun 1997 peneliti datang ke daerah ini bertahan 2 tahun, kemudian kembali lagi ke Jawa karena tidak betah saat itu, dan akhirnya kembali lagi ke Desa Teluk Panji IV tahun 2004 sampai sekarang ini. Kondisi

tersebut membuat penulis sampai sekarang bertahan merasakan kehidupan sosial budaya yang kental dengan budaya Jawa karena memang mayoritas penduduknya berasal dari Jawa. Hal inilah yang memberikan semangat tersendiri bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Selain untuk menelaah bagaimana kehidupan sosial, ekonomi dan adaptasi budaya masyarakat transmigran di desa tersebut.

Pada saat membahas tentang transmigrasi pada dasarnya bukanlah hal yang istimewa, karena sebagian besar penduduk Indonesia melakukan penyebaran lewat program transmigrasi. Adapun pulau-pulau yang dituju sebagai lokasi transmigrasi adalah pulau yang masih jarang penduduknya yang terletak di luar pulau Jawa. Menurut Suparno (2005:28) Pada tahun 1899 muncul adanya politik etis yang dicetuskan oleh Van Deventer. Gagasan adanya politik etis dilatar belakangi oleh politik tanam paksa Belanda (Cultur Stelsel) yang tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya dari kalangan elite Belanda saat itu. Dengan adanya politik tanam paksa penduduk Jawa yang semula pola hidupnya hendak dimodernisasi melalui proyek "*pengembangbiakan*" yang tercantum dalam program tanam paksa yaitu orang Jawa melalui pengenalan tanaman pangan cadangan seperti singkong dan jagung, pengendalian penyakit menular seperti cacar dan pes, serta pengendalian sanitasi lingkungan, sehingga Belanda dapat memprediksi tingkat populasi penduduk Jawa pada masa-masa berikutnya. Sehingga pada saat itu penduduk Jawa mempunyai pola hidup yang lebih modern bila dibandingkan dengan penduduk pulau lainnya. Namun ternyata penduduk Jawa tidak mengalami peningkatan dalam kualitas hidupnya. Pengangguran, kemiskinan, dan wabah penyakit merebak di mana-mana.

Populasi penduduk Jawa yang banyak ternyata tidak membawa berkah pada saat itu tetapi justru musibah yang berkepanjangan.

Kondisi memprihatinkan ini kemudian mengundang simpati kelas menengah di Negeri Belanda. Adapun isi dari politik etis (balas budi) yaitu edukasi, irigasi, emigrasi (kolonisasi) yang diyakini akan mampu menebus dosa kemanusiaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan politik Tanam Paksa. Setidaknya lewat program politik etis tersebut diharapkan penduduk Indonesia, khususnya masyarakat Jawa dapat memperbaiki hidupnya melalui kesempatan memperoleh pendidikan yang memadai, dapat bertani dan menggarap sawah untuk memenuhi kebutuhan. Pertama dengan membangun sarana irigasi (karena mayoritas penduduknya hidup dari bertani) dan kedua dapat memperbaiki nasibnya dengan hidup lebih baik lewat jalan migrasi (karena jumlah penduduk yang padat karena tidak dapat diimbangi oleh tersedianya lapangan pekerjaan).

Menurut Suparno (2005:30) untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, pemerintah Hindia Belanda menugaskan H.G. Heyting seorang asisten residen, untuk membuat analisa tentang kemungkinan penyelenggaraan program pemindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau yang masih jarang penduduknya dan yang dianggap potensial bagi pengembangan usaha pertanian. Laporan Heyting menurut Suparno (2005:31) yang dibuat pada tahun 1903 tersebut menyarankan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk membangun desa-desa baru di luar pulau Jawa, dengan jumlah penduduk rata-rata 500 KK setiap desa, disertai bantuan

ekonomi secukupnya agar desa-desa tersebut dapat berkembang dan memiliki daya tarik bagi para pendatang baru. Program ini kemudiani beri nama “kolonisasi” dan bisa di sebut sebagai cikal bakal konsepsi transmigrasi yang kita kenal sekarang ini.

Transmigrasi yang pertama kali dilaksanakan pada masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu pada tahun 1905 sebanyak 155 KK (815 jiwa) penduduk Jawa Tengah menuju Gedong Tataan Lampung. Di tempat itu para pendatang membangun desa yang diberi nama Bagelen, sebagai desa kolonisasi pertama. Empat desa lainnya dibangun antara tahun 1906 dan 1991. Setiap kepala keluarga di dusun tersebut memperoleh (70) tujuh puluh are sawah dan (30) tiga puluh are pekarangan. Sedangkan biaya transportasi, bahan bangunan, peralatan, dan jaminan hidup selama 2 tahun di tanggung oleh proyek. Program Transmigrasi dilanjutkan kembali pada masa pemerintahan Orde Lama dengan sebutan transmigrasi gaya baru. Kebijakan transmigrasi baru ini menekankan pada transmigrasi Swakarsa.

Simanjatak (1997) dalam era otonomi daerah, salah satu persoalan yang dihadapi dalam pembangunan transmigrasi adalah kurang sesuaiya kompetensi SDM (transmigran) dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi SDA yang ada dilokasi. Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki transmigran pada umumnya rendah dan kurang sesuai dengan kebutuhan untuk pengembangan potensi SDA yang ada, sehingga upaya pengembangan potensi (lahan) tidak dapat memberikan hasil optimal. Meskipun sejak ditetapkan menjadi calon transmigran hingga dalam masa pembinaan

transmigran telah dilakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, namun hasilnya belum menggembirakan. Dalam lokasi/kawasan permukiman transmigrasi yang ideal adalah apabila dihuni oleh komunitas masyarakat yang memiliki kriteria kompetensi yang beragam, dan sesuai dengan kompetensi keterampilan dan keahliannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleh karena itu dalam pengiriman transmigran, Pemerintah daerah tujuan menentukan kompetensi SDM yang dibutuhkan sesuai dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan lingkungan sosial budaya pada kawasan yang akan dikembangkan, sedangkan Pemerintah Daerah asal menyiapkan kriteria kompetensi SDM transmigran yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi.

Menurut peneliti, kebanyakan transmigran yang dikirim dari Jawa ke Desa Teluk Panji adalah masyarakat petani dengan tingkat pendidikan rendah rata-rata sehingga sulit untuk menempati jabatan-jabatan yang strategis dalam perkebunan atau pemerintahan. Mereka kebanyakan hanya bisa jadi buruh tani kelapa sawit saja, sedangkan dalam kenyataannya sebuah wilayah akan menjadi sebuah desa baru membutuhkan tenaga berpendidikan dan keahlian. Hal ini menghambat terjadinya perkembangan suatu wilayah transmigrasi karena kekurangan sumber daya manusia sebagai aktor dalam pembangunan di wilayah transmigrasi yang baru di buka. Hal tersebut memberikan peluang kepada sebagian kecil penduduk transmigran untuk menjadi aparat desa, asisten ataupun mandor dan guru bagi yang mempunyai pendidikan minimal sekolah tingkat atas untuk mengisi lowongan tersebut selebihnya berasal dari penduduk lokal.

Irawan (1997) “Kajian kemitraan pola PIR dalam upaya peningkatan pendapatan di Tapanuli Selatan”. Dalam era otonomi daerah penyelenggaraan transmigrasi dilakukan melalui mekanisme Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) yakni antara pemerintah daerah asal dengan pemerintah penerima transmigrasi. Dalam KSAD tersebut, pemerintah daerah asal mempunyai kewajiban untuk menyiapkan SDM transmigran yang sesuai dengan kriteria kompetensi yang dibutuhkan oleh daerah penerima transmigrasi, sedangkan pemerintah penerima transmigrasi berkewajiban menyiapkan lokasi pemukiman dan pembinaan sampai mereka mampu mandiri sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Namun dalam perjalanannya kesepakatan ini tidak mudah direalisasikan, karena transmigran yang dikirim dari daerah asal tetap belum mempunyai kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan di lokasi transmigrasi. Oleh karena itu dalam nota kesepakatan bersama, sebaiknya telah mencantumkan butir-butir pekerjaan transmigran, dan disertai dengan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Sehingga mempercepat kemajuan dan perkembangan desa di areal transmigrasi yang baru dengan adanya berbagai profesi dan sumber daya yang kompeten dari para transmigran tersebut.

Istilah Perkebunan Inti Rakyat pada awalnya bernama *Nucleus Estate Smallholder* (NES), kemudian istilah tersebut berubah menjadi Perkebunan Inti Rakyat – Perkebunan (PIR-BUN) dan disusul lagi dengan istilah Perkebunan Inti Rakyat -Transmigrasi (PIR-TRANS) khusus daerah baru (transmigrasi). Pengembangan transmigrasi pola perkebunan adalah dalam rangka peningkatan produksi perkebunan melalui investasi swasta, diarahkan untuk

mencukupi kebutuhan nasional dan peningkatan ekspor non migas. Pada permukiman transmigrasi dapat dikembangkan melalui kerjasama antara perusahaan/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta dengan transmigran, dalam ikatan hubungan mitra usaha inti plasma. Transmigran dapat didudukkan sebagai petani yang memiliki lahan perkebunan sendiri untuk digunakan sebagai kebun plasma yang diperoleh melalui kredit investasi. Untuk menambah pendapatan para transmigran mendapat alokasi lahan pangan/diversifikasi, sebagai upaya mengatasi resiko kekurangan penghasilan.

Dalam menjalin hubungan mitra usaha maka perusahaan inti mempunyai tanggung jawab penuh membina manajemen seluruh usaha tani transmigran, melalui pengendalian hari kerja keluarga transmigran secara efisien, baik didalam mengelola lahan pangan maupun lahan plasma, terutama pada saat musim tanam panen. Dengan demikian perusahaan inti akan dapat berperan di dalam menjamin tercapainya sasaran peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan transmigran. Dalam hubungan ini perusahaan inti perlu dilibatkan dalam proses seleksi dan latihan transmigrasi. Dalam pelayanan umum masyarakat dan penyediaan fasilitas lainnya serta seluruh kebutuhan hidup dan rumah tangga transmigran, menjadi kewajiban perusahaan inti untuk mengelola sendiri, atau kerjasama dengan berbagai unsur pemerintah. Dalam pola ini, peran Pemerintah adalah untuk menjamin keadilan, keseimbangan dan keserasian serta kelancaran hubungan ke-mitra-an usaha antara perusahaan inti dan transmigran agar selalu saling menguntungkan serta kejelasan didalam memiki terjadinya resiko.

Menurut peneliti, pola kemitraan yang terjadi di Desa Teluk Panji dengan Pt. Abdi Budi Mulia belum sepenuhnya untuk meningkatkan taraf hidup bagi warga transmigran kenyataannya dengan areal kebun yang luas sekolah tidak punya dan prasarana kesehatan yang kurang memadai. Sehingga adanya sekolah swasta pada tingkat pertama dan atas merupakan inisiatif warga transmigran sebagai kebutuhan adanya pendidikan yang bernafaskan agama. Pada gilirannya hanya menjanjikan akan memberikan bantuan gedung sekolah ternyata sampai 25 tahun terakhir janji tersebut hanya tinggal janji, padahal puluhan anak karyawan mereka ikut sekolah di daerah transmigrasi. Bagi yang memiliki Lahan sawit lebih dari 1 kapling yang peneliti lihat bisa lebih sejahtera hal itu didukung harga sawit yang naik turun, namun kalau hanya 1 kapling hidup pas-pasan gaji dari lahannya kadang minus untuk membayar hutang kebutuhan pokok di koperasi unit desa dan juga membayar angsuran-angsuran lainnya. lahan gambut yang tingkat keasaman tinggi membutuhkan biaya yang tidak sedikit seperti: pupuk, racun dan perawatan agar menghasilkan panen yang maksimal. Sedangkan para karyawan yang kerja di Pt. tersebut mempunyai gaji yang standar tanpa adanya dana pensiun pada hari tua.

Transmigrasi yang dilaksanakan di Desa Teluk Panji IV, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan terjadi pada masa Orde Baru tahun 1992. Bentuk transmigrasi yaitu PIR(perkebunan inti rakyat) yang melibatkan perusahaan swasta asing yaitu PT.Abdi Budi Mulia sebagai bapak angkat. Areal transmigrasi adalah lahan gambut dengan luas 3000 ha meliputi empat Desa yaitu Desa Teluk Panji1, Teluk Panji II, Teluk Panji III dan Teluk Panji IV.

Para transmigran 80% berasal dari Jawa asli sedangkan 20% penduduk lokal yang mendaftar ke Jakarta dengan syarat-syarat tertentu melalui agen atau calo. Berdasarkan informasi data yang diperoleh dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja Provinsi Sumatera Utara, awal mula jumlah penduduk transmigran di Desa Teluk Panji IV Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan pada akhir tahun 1991 yaitu dari DKI Jakarta (penduduk lokal) sejumlah 51 kk = 188 jiwa, Jawa Tengah sejumlah 84 kk = 342 jiwa dan paling banyak Jawa Timur sejumlah 146 kk = 490 jiwa, jadi saat itu total seluruhnya berjumlah 281 KK dari total penduduk 1.020 jiwa.

Fasilitas yang dijanjikan oleh pemerintah kepada transmigran adalah kebun sawit yang sudah di tanami 2 hektar dengan cara mengkredit. Kemudian rumah dan pekarangan $\frac{1}{2}$ hektar gratis dari Pemerintah. Kebutuhan pokok yaitu beras, gula, dan ikan asin (kepala batu) dapat gratis jatah dari pemerintah selama 2 tahun, pada awal kehidupan mereka para transmigran. Namun dalam kenyataan ternyata rumah dan lahan yang pernah dijanjikan oleh Pemerintah ternyata jauh dari kenyataan. Lahan sawitnya belum di tanami beberapa meter dari rumah penduduk masih hutan dan kondisi tanahnya adalah tanah gambut, air merah, kayu tunggul (bekas tebang pohon) bertebaran dimana-mana ditambah lagi prasarana jalan dan transportasi serta penerangan listrik yang belum ada.

Maka tidak mengherankan, bila banyak diantara transmigran yang tidak tahan dalam kondisi tersebut akhirnya pulang ke Jawa dengan menjual lahannya dengan sembunyi-sembunyi, dengan harga murah lahan dijual asalkan mereka bisa balik ke kampung halamannya.

Berdasarkan informasi dari aparat desa Teluk Panji IV Kampung Rayat Labuhanbatu Selatan bahwa penduduk transmigran asli dari Jawa tinggal tersisa sekitar 60 kk dari jumlah 526 kk sekarang ini.

Elfira (2013) orang Jawa mempunyai konsep hidup “nrimo” yaitu cara pandang hidup mereka terhadap apa yang sudah ditakdirkan Tuhan terhadap mereka namun “nrimo” bukan berarti hanya berdiam diri dan menyerah terhadap nasib. “Nrimo” adalah sebuah pandangan bagi orang Jawa dalam memandang hidup yaitu dengan mensyukuri pemberian Tuhan dan selalu berusaha untuk lebih baik. Sistem pengetahuan ini sangat erat hubungannya dengan keyakinan mereka sebagai umat islam dalam memandang hidup. Keyakinan ini mereka sebut dengan ”sinten ingkang ndamel ngangge, sinten ingkang nanem ngunduh” (siapa yang berusaha dialah yang akan berhasil dan siapa yang menanam dialah yang akan memanen). Dari konsep hidup tersebut bahwasanya para transmigran Jawa pada awal hingga saat ini yang bisa bertahan dan pantang menyerah dengan keadaan akan memetik hasilnya.

Menurut peneliti, pada kondisi tersebut diatas para transmigran perlu adanya adaptasi ekologi untuk bisa bertahan hidup di lokasi yang baru dibuka. Melihat bahwa kenyataan di lokasi transmigrasi yang mereka temui berbeda jauh dari lingkungan daerah asal mereka di Jawa.. Para transmigran juga bergaul dan bersosialisasi dengan penduduk lokal yaitu etnis Mandailing, Simalungun, Karo, Jawa (pujakesuma) dan lain-lain mereka saling mengisi kebudayaan dan berakulturasi antara satu budaya satu dengan yang lainnya sehingga bisa hidup berdampingan secara damai .

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kedatangan transmigran di Desa Teluk Panji IV, Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan ?
2. Bagaimana kehidupan ekonomi transmigran di Desa Teluk Panji IV, Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan?
3. Bagaimana proses akulturasi budaya para transmigran di Desa Teluk Panji IV, Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan
4. Bagaimana strategi adaptasi transmigran Jawa dengan budaya lokal di Desa Teluk Panji IV, Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis proses kedatangan Transmigran di Desa Teluk Panji IV, Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan
2. Menganalisis kehidupan ekonomi transmigran di Desa Teluk panji IV, Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan
3. Menganalisis proses akulturasi budaya para transmigran di Desa Teluk Panji IV, Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan
4. Menelaah pola adaptasi transmigran Jawa terhadap budaya lokal di Desa Teluk Panji IV, Kampung Rakyat, Labuhanbatu Selatan

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan masukan terhadap pemerintah tingkat lokal dan Nasional serta masyarakat tentang pentingnya program transmigrasi terutama dalam upaya pemerataan penduduk, pertumbuhan ekonomi Nasional dan kesejahteraan serta integritas ketahanan Nasional untuk masyarakat transmigrasi dari Jawa ke desa Teluk Panji IV Kampung Rakyat Labuhanbatu Selatan serta melihat kembali perkembangan perekonomian, adaptasi, kebudayaan. Bagaimana seharusnya sikap dan tindakan Pemerintah dalam program transmigrasi selanjutnya untuk bersikap terbuka dan jujur kepada para transmigran.

2) Manfaat teoritis

Secara akademisi diharapkan dapat menambah dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang antropologi sosial, berkaitan dengan masalah program transmigrasi yang erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini mampu memberikan kontribusi kepastakaan yang mengandung informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan memberikan gambaran awal yang mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai penelitian lanjutan.